



Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik di Australia dan Indonesia dalam E-Government

Eka Prastyo^{1*}, Aminullah²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: prastyoea98@gmail.com

Abstract. *The development of e-Government has become a key strategy in modernizing public administration in various countries, including Australia and Indonesia. The application of information and communication technology in government administration aims to improve bureaucratic efficiency, the quality of public services, and realize the principles of good governance. This study aims to analyze and compare the development of public administration in the implementation of e-Government in Australia and Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a literature review of relevant and accessible scientific journals, academic books, and policy documents. The results show that Australia has a higher level of e-Government maturity, characterized by good digital service integration, infrastructure readiness, and adequate human resource capacity. Meanwhile, Indonesia has shown significant progress through the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), but still faces challenges such as infrastructure gaps, limited apparatus competency, and fragmented service systems. This research is expected to contribute concepts to the development of e-Government policies and public administration reform in Indonesia.*

Keywords: *Australia; E-Government; Indonesia; Public Administration; SPBE.*

Abstrak. Perkembangan e-government menjadi salah satu strategi utama dalam modernisasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Australia dan Indonesia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perkembangan administrasi publik dalam penerapan e-government di Australia dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dan dapat diakses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki tingkat kematangan e-government yang lebih tinggi, ditandai dengan integrasi layanan digital yang baik, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Sementara itu, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur, keterbatasan kompetensi aparatur, serta fragmentasi sistem layanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan e-government dan reformasi administrasi publik di Indonesia.

Kata kunci: Administrasi Publik; Australia; E-Government; Indonesia; SPBE.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara pemerintah menjalankan fungsi-fungsi administratifnya. Perkembangan ini mendorong transformasi dari sistem pemerintahan konvensional menuju tata kelola berbasis digital yang lebih modern. Dalam era digital, banyak negara berlomba-lomba mengadopsi konsep e-government guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, e-government merujuk pada pemanfaatan TIK dalam aktivitas pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik, pertukaran informasi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat secara elektronik, yang pada akhirnya berkaitan erat dengan reformasi administrasi publik secara menyeluruh (Ditasman & Amrullah, 2024).

E-government telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah mempercepat proses pelayanan, menyederhanakan prosedur administratif, serta mengurangi ketergantungan pada mekanisme birokrasi manual yang sering kali tidak efisien. Selain itu, e-government juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik secara terbuka dan mudah. Dalam konteks tersebut, e-government kerap dikaitkan dengan konsep *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, keterbukaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah (Septiani et al., 2022).

Meskipun e-government telah diadopsi secara luas, tingkat kemajuannya antara negara maju dan negara berkembang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Australia sebagai salah satu negara maju telah lama mengimplementasikan berbagai inisiatif e-government di berbagai sektor pemerintahan, seperti portal layanan nasional terpadu, sistem perpajakan daring, layanan perizinan elektronik, dan identitas digital. Tingginya tingkat digitalisasi layanan publik di Australia mencerminkan kematangan e-government yang relatif mapan, ditandai oleh integrasi antarlembaga dan standar layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi perkembangan e-government yang belum merata antarwilayah (Septiani et al., 2022).

Di Indonesia, e-government dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mengintegrasikan teknologi digital dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. SPBE diarahkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Sebagai kerangka kebijakan nasional, SPBE dirancang untuk menyelaraskan sistem layanan publik berbasis elektronik di tingkat pusat dan daerah. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE belum optimal akibat kendala struktural, seperti keterbatasan infrastruktur TIK, ketimpangan kompetensi digital aparatur, serta lemahnya integrasi data antarinstansi pemerintahan (Hadi & Widnyani, 2024).

Selain kendala struktural, kesenjangan digital antarwilayah juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan e-government di Indonesia. Perbedaan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta daerah terpencil, memengaruhi efektivitas penerapan layanan berbasis elektronik. Berbagai studi mengenai layanan administrasi kependudukan dan perizinan menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah telah berhasil menerapkan e-government secara efektif, masih banyak wilayah lain yang menghadapi hambatan serius, baik dari sisi infrastruktur maupun tingkat penerimaan dan literasi digital masyarakat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial dan kelembagaan(Rambe, 2022).

Dari perspektif akademik, kajian mengenai perkembangan e-government lintas negara tidak hanya berfokus pada tingkat adopsi teknologi digital semata. Studi e-government juga menelaah konteks administrasi publik yang lebih luas, termasuk struktur birokrasi, kebijakan publik, serta dampak sosial dan ekonomi dari implementasinya. Hal ini penting karena e-government membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi antara pemerintah dan warga negara. Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemudahan akses layanan, tetapi juga mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses pemerintahan(Rambe, 2022).

Australia sering dijadikan contoh dalam studi e-government karena komitmen jangka panjang pemerintahnya dalam mengembangkan layanan publik berbasis digital. Pemerintah Australia telah menetapkan standar layanan digital yang jelas serta membangun portal layanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah melalui satu sistem identitas digital. Contohnya adalah portal nasional seperti myGov yang mengintegrasikan layanan perpajakan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya dalam satu platform. Inisiatif ini mencerminkan tingkat integrasi dan interoperabilitas data yang tinggi, yang menjadi indikator utama dalam menilai kematangan e-government suatu negara(Rambe, 2022).

Di sisi lain, Indonesia meskipun telah mengembangkan berbagai inisiatif digital melalui SPBE dan sejumlah aplikasi layanan publik, masih menghadapi tantangan dalam hal standarisasi layanan dan interoperabilitas sistem. Kompleksitas geografis dan demografis Indonesia, serta perbedaan tingkat adopsi teknologi antar daerah, menjadi faktor penghambat pemerataan implementasi e-government. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas SPBE diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara, pembangunan infrastruktur TIK yang lebih merata, serta komitmen kebijakan yang konsisten dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah(Hadi & Widnyani, 2024).

Dalam konteks perbandingan internasional, studi e-government tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara mengadopsi teknologi digital, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Perbandingan antara Australia dan Indonesia dalam bidang administrasi publik dan e-government dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik, kesenjangan yang masih ada, serta strategi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perbandingan perkembangan e-government antara Australia

dan Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Administrasi Publik dan E-Government

Administrasi publik adalah bidang keilmuan yang mengkaji penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan fungsi negara dan menyediakan layanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Bidang ini tidak hanya membahas implementasi kebijakan, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang melibatkan interaksi pemerintah, warga, dan pemangku kepentingan. Dalam modernisasi pemerintahan, e-government berperan sebagai strategi reformasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Irawan, 2022).

E-government secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam penyampaian layanan publik secara elektronik kepada masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pemerintah lainnya. Tujuan penerapannya meliputi percepatan proses administrasi, peningkatan akses layanan, efisiensi biaya, serta penguatan pertukaran informasi, sehingga mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan (Irawan, 2022).

Sebagai konsep administrasi publik kontemporer, e-government tidak hanya berfokus pada layanan daring, tetapi juga pada transformasi internal birokrasi melalui digitalisasi proses kerja. Perubahan ini menggeser pola pelayanan konvensional menuju sistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan responsif, sehingga mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Regina Argianti, 2025).

Indikator Perkembangan E-Government

Perkembangan e-government tidak dapat dinilai secara subjektif, melainkan membutuhkan seperangkat indikator yang sistematis dan terukur. Indikator tersebut berperan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat implementasi serta keberhasilan e-government dalam administrasi publik. Berbagai kajian akademik menunjukkan adanya sejumlah indikator utama yang kerap digunakan dalam analisis empiris maupun perumusan kebijakan (Nurkartika, 2025).

Aksesibilitas dan ketersediaan layanan digital bagi masyarakat merupakan indikator dasar dalam e-government. Keberadaan portal layanan publik, aplikasi daring, dan saluran digital lainnya mencerminkan upaya pemerintah menjangkau warga secara elektronik. Akses

digital yang memadai menunjukkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan dan informasi publik tanpa interaksi tatap muka langsung(Septiani et al., 2022).

Integrasi sistem pemerintahan menjadi indikator penting yang menggambarkan kemampuan e-government dalam menghubungkan berbagai unit dan instansi pemerintah. Integrasi ini bertujuan mencegah terjadinya fragmentasi layanan akibat penggunaan sistem yang terpisah. Sistem terintegrasi mendukung koordinasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mengurangi pengulangan data dan beban kerja birokrasi(Nurkartika, 2025).

Kualitas layanan publik berbasis digital juga menjadi tolok ukur utama dalam penilaian e-government. Aspek yang dinilai meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, keamanan data, serta kenyamanan pengguna. Evaluasi kualitas layanan digital berkaitan erat dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang disediakan melalui platform elektronik(Septiani et al., 2022).

Indeks e-government merupakan indikator komprehensif yang sering digunakan dalam studi perbandingan antarnegara. Indeks ini umumnya mencakup dimensi layanan daring, partisipasi digital, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur TIK. Pengukuran tersebut banyak digunakan dalam laporan internasional dan kajian akademik untuk menilai perkembangan e-government secara nasional(Irawan, 2022).

Konteks Perkembangan di Australia dan Indonesia

Perkembangan e-government di berbagai negara menunjukkan perbedaan mencolok, dipengaruhi kesiapan teknologi, kebijakan nasional, dan kapasitas birokrasi. Australia sering dipandang memiliki kematangan e-government tinggi karena mengembangkan sistem digital terpadu sejak lama. Sistem tersebut meningkatkan mutu layanan publik, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui perencanaan jangka panjang, investasi TIK berkelanjutan, serta pemanfaatan data untuk efisiensi pelayanan publik secara konsisten dan berorientasi masa depan(Katsonis & Botros, 2015).

Indonesia menginisiasi berbagai program digital pemerintahan, terutama melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Program ini bertujuan menyelaraskan layanan digital pemerintah pusat dan daerah. SPBE dirancang mendorong tata kelola terkoordinasi, transparan, dan efektif melalui digitalisasi proses administrasi, integrasi aplikasi, standarisasi data, serta peningkatan kualitas layanan publik berkelanjutan yang memperkuat akuntabilitas, efisiensi operasional, dan kepercayaan masyarakat nasional dalam pelaksanaan kebijakan digital.

Sejumlah penelitian menunjukkan penerapan SPBE berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi

kendala struktural dan teknis. Ketimpangan akses digital antarwilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya integrasi sistem menghambat penyatuan layanan digital pemerintah secara menyeluruh, konsisten, dan berkeadilan. Kondisi ini menuntut perbaikan kebijakan, koordinasi lintas lembaga, dan investasi berkelanjutan nasional dalam jangka panjang (Sundari & Sartika, 2025).

Dalam kajian akademik dan praktik kebijakan, perbandingan e-government Australia dan Indonesia penting dilakukan. Analisis ini membantu memahami karakteristik, konteks implementasi, serta capaian masing-masing negara. Dengan mengidentifikasi praktik terbaik Australia yang relevan, Indonesia berpeluang mengadaptasi strategi efektif guna mempercepat transformasi digital administrasi publik dan mendukung reformasi birokrasi berkelanjutan melalui pembelajaran kebijakan, inovasi layanan, dan penguatan tata kelola nasional di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai strategi utama pengumpulan data (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam dinamika, pola, serta perbandingan perkembangan administrasi publik dalam implementasi e-government di Australia dan Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengacu pada temuan konseptual dan empiris dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kerangka kebijakan, konsep teoritis, indikator pengukuran, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-government pada kedua negara. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku rujukan, serta situs web resmi dan terpercaya. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan hasil kajian berdasarkan tema, indikator, dan konteks implementasi. Selanjutnya, dilakukan perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor penentu keberhasilan dan hambatan e-government. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman konseptual dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan E-Government di Australia

Perkembangan e-government di Australia merupakan salah satu contoh kemajuan digital pemerintahan yang sering dijadikan acuan dalam kajian administrasi publik. Australia telah menerapkan e-government secara luas di berbagai sektor pemerintahan, seperti layanan pajak

digital (digital taxservices), sistem informasi kesehatan online, layanan keamanan sosial, serta administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Implementasi e-government di Australia mempunyai orientasi pelayanan yang kuat pada warga negara (citizen-centric), di mana sistem digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintahan secara efisien, transparan, dan terintegrasi tanpa perlu berinteraksi langsung dengan instansi pemerintahan(Rambe, 2022).

Portal pelayanan terpadu (single digital portal) menjadi komponen penting dalam strategi e-government Australia. Melalui portal ini, pengguna dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu antarmuka digital, termasuk informasi regulasi, pembayaran layanan, hingga transaksi administratif sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga mengurangi bottleneck birokrasi tradisional yang seringkali memakan waktu dan biaya lebih besar bagi masyarakat. Literasi e-government di Australia juga cenderung tinggi, didukung oleh kesiapan infrastruktur TIK yang merata serta kemampuan digital aparatur negara yang relatif matang(Rambe, 2022).

Meskipun tingkat kematangan e-government Australia tergolong tinggi, kajian akademik tetap menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah integrasi data lintas lembaga pemerintahan, terutama dalam konteks pertukaran informasi antara sistem layanan nasional dengan sistem layanan di tingkat negara bagian atau lokal. Tantangan lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan siber, di mana semakin berkembangnya layanan digital juga meningkatkan kebutuhan akan mekanisme proteksi data yang lebih kuat dan komprehensif. Perlindungan atas data warga negara menjadi isu esensial terutama dalam era digital yang semakin mengandalkan big data dan layanan daring yang terhubung ke berbagai sistem publik(Rambe, 2022).

Keberhasilan e-government di Australia juga diukur melalui indeks perkembangan e-government (E-Government Development Index/E-GDI) dan indikator lain seperti layanan daring (onlineservices), partisipasi elektronik (e-participation), kualitas infrastruktur telekomunikasi, serta sumber daya manusia yang terlatih. Hasil-hasil studi akademik menunjukkan bahwa Australia secara konsisten tampil di posisi tinggi dalam pemeringkatan global e-government, yang mencerminkan konsistensi kebijakan dan komitmen pemerintah dalam mendorong digitalisasi administrasi publik(Anggita et al., 2025).

Aspek ini juga menggarisbawahi bahwa e-government bukan sekadar technological adoption, melainkan juga transformasi budaya organisasi birokrasi yang mensyaratkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan digital. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital bagi aparatur negara dan penguatan tata kelola digital sehingga pelayanan publik

dapat dijalankan secara efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital (Rambe, 2022).

Secara keseluruhan, perkembangan e-government di Australia menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi publik telah memasuki tahap yang lanjut, dengan fokus pada pelayanan warga negara yang cepat, terjangkau, dan transparan. Kendati demikian, upaya terus diperlukan dalam hal integrasi data lintas sektor dan perlindungan privasi warga negara agar e-government dapat memberikan dampak maksimal terhadap efisiensi birokrasi dan kepercayaan publik.

Perkembangan E-Government di Indonesia

Perkembangan e-government di Indonesia dimulai sejak awal abad ke-21 dan mengalami fase evolusi yang cukup dinamis sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Secara kebijakan, Indonesia mengadopsi kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 sebagai dasar implementasi e-government di berbagai instansi pemerintahan. SPBE dirancang untuk memperkuat digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup tata kelola, manajemen layanan, serta integrasi antar sistem pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, responsif, dan akuntabel melalui teknologi digital (Sugianto et al., 2025).

Dalam praktiknya, e-government di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, ditandai oleh peningkatan jumlah layanan digital yang tersedia bagi masyarakat. Beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan aplikasi e-government untuk layanan administrasi publik, seperti BPJS Kesehatan yang mengembangkan Mobile JKN dan i-Care, serta berbagai portal layanan pemerintahan daerah yang mempermudah akses informasi dan proses administrasi. Implementasi e-government juga membantu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi data layanan publik (Nurkartika, 2025).

Namun, perkembangan e-government di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan fungsional. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses digital antar wilayah, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur TIK memadai sehingga akses layanan digital masih terbatas. Kondisi ini memperlebar disparitas kualitas layanan publik digital antar daerah, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaat e-government secara merata (Regina Argianti, 2025).

Kendala lain yang sering dikemukakan dalam kajian literatur adalah ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia ASN dalam penguasaan teknologi digital. Banyak aparatur pemerintahan yang belum memiliki kompetensi teknis yang cukup untuk mengelola sistem e-

government secara optimal, khususnya terkait pengembangan aplikasi, manajemen data, dan layanan digital yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada efektivitas implementasi SPBE di beberapa instansi pemerintahan (Subhan & Sartika, 2025).

Selain itu, fragmentasi sistem pemerintahan elektronik juga masih menjadi isu penting. Berbagai aplikasi dan sistem digital yang dikembangkan cenderung bersifat terpisah tanpa integrasi yang efektif, sehingga mengurangi efisiensi administrasi dan mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan yang sebenarnya saling berhubungan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah layanan e-government meningkat, kualitas integrasi dan interoperabilitas antar sistem masih perlu diperkuat (Sugianto et al., 2025).

Terdapat faktor non-teknis seperti kepemimpinan digital dan budaya organisasi birokrasi dalam mendukung atau menghambat perkembangan e-government di Indonesia. Kepemimpinan yang kuat, komitmen politis, serta budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi merupakan faktor penting untuk mendorong implementasi e-government yang konsisten dan berkelanjutan (Kencono et al., 2024).

Walaupun menghadapi tantangan, beberapa studi menunjukkan bahwa perkembangan e-government di Indonesia memiliki dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Misalnya, peningkatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, serta pengurangan birokrasi manual yang panjang dan rentan kesalahan. Dengan demikian, perkembangan e-government menunjukkan tren yang menjanjikan, meskipun masih memerlukan perbaikan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan integrasi sistem (Sundari & Sartika, 2025).

Secara keseluruhan, e-government di Indonesia telah mencatat beberapa kemajuan penting melalui SPBE sebagai payung kebijakan nasional. Namun, untuk mencapai tingkat kematangan yang setara dengan negara maju, diperlukan upaya terintegrasi yang meliputi penguatan infrastruktur TIK di seluruh wilayah, peningkatan kemampuan digital ASN, serta harmonisasi sistem layanan digital antar instansi pemerintahan.

Perbandingan Utama E-Government di Australia dan Indonesia

Terdapat aspek perbandingan antara E Government Australia dan Indonesia yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Utama E-Government di Australia dan Indonesia.

Aspek	Australia	Indonesia
Integrasi Layanan Digital	Tinggi dan terkoordinasi luas	Sedang berkembang, belum merata
Kualitas Layanan Online	Sangat baik, user-oriented	Bervariasi, beberapa masih sederhana
Kesiapan Infrastruktur	Kuat di seluruh negara	Terdapat gap di beberapa daerah
Kapasitas SDM ASN	Umumnya terlatih di bidang digital	Masih perlu peningkatan kompetensi
Transparansi dan Akuntabilitas	Tinggi melalui portal publik	Proses perbaikan terus berlanjut

Tabel ini menunjukkan bahwa perkembangan e-government di Australia berada pada tingkat yang lebih matang dibanding di Indonesia, meskipun kedua negara tetap memiliki fokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi digital (Rambe, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan e-government di Australia dan Indonesia menunjukkan tingkat kematangan yang berbeda. Australia telah berhasil mengimplementasikan e-government secara komprehensif dengan sistem layanan digital yang terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini menjadikan e-government di Australia mampu meningkatkan efisiensi administrasi publik serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Di sisi lain, Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dalam pengembangan e-government melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah. Meskipun demikian, implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan akses digital antar wilayah, keterbatasan kompetensi aparatur sipil negara di bidang teknologi informasi, serta belum optimalnya integrasi antar sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata agar

penerapan e-government di Indonesia dapat mencapai tingkat efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para peneliti dan akademisi yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi dalam penelitian ini. Selain itu, apresiasi diberikan kepada institusi pendidikan dan pengelola jurnal ilmiah yang telah menyediakan akses terhadap publikasi ilmiah sebagai bahan kajian. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi akademik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang administrasi publik dan e-government.

DAFTAR REFERENSI

- Anggita, I., Listiani, E. I., & Ahdarrijal, Y. (2025). Openness in governance: The effect of the e-government index on regulation quality in Australia. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 42–55. <https://doi.org/10.54144/govsci.v6i1.109>
- Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Kajian literatur: Reformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525–533. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.1075>
- Hadi, I., & Widnyani, I. (2024). Modernization and digitalization of public services: Realizing a golden Indonesia through harmonization of electronic-based government systems (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6, 639–658. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>
- Irawan, B. (2022). Studi analisis konsep e-government: Sebuah paradigma baru dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 174–201. <https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.351>
- Katsonis, M., & Botros, A. (2015). Digital government: A primer and professional perspectives. *Australian Journal of Public Administration*, 74(1), 42–52. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12144>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Nurkartika, N. (2025). E-government transformasi menuju good governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 1–10.
- Rambe, M. (2022). Perbandingan perkembangan administrasi publik di Australia dan Indonesia dalam penerapan e-government. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 232–248. <https://doi.org/10.55606/jhpiis.v1i3.1546>

- Regina Argianti, D. S. K. (2025). Penerapan e-government dalam layanan administrasi: Evaluasi keberhasilan dan kendala. *Jurnal Administrasi dan Kependudukan*, 13(1), 84–93. <https://doi.org/10.30656/sawala.v13i1.9829>
- Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A. R., Resti, A., Fazira, V., Wijaya, D. A. S., & Aldeo, Z. (2022). Peranan e-government dalam pelayanan publik. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(5), 302–313. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183>
- Subhan, S., & Sartika, I. (2025). Tantangan dan strategi implementasi SPBE dalam reformasi birokrasi pelayanan publik di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4648–4656. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809>
- Sugianto, L. P. M., Dahyar, S. S., Saputro, V. S., Aryonindito, S., & Rahmat, K. (2025). Transformasi digital sistem pemerintah Indonesia: Analisis longitudinal domain SPBE tahun 2018–2024. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 9(2), 287–300. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v9i2.2091>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-4). Alfabeta.
- Sundari, W., & Sartika, I. (2025). Advancing public service quality through Indonesia's electronic-based government system. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(8), 902–911.